

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 2011-2015

Zulva Yuniati¹
Universitas PGRI Madiun
Yuniatizulva@gmail.com

Elva Nuraina²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
elvanuraina99@gmail.com

Elly Astuti³
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
elly2191@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit terhadap manajemen pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dengan sampel akhir 95 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda menggunakan bantuan program *IBM SPSS Statistic versi 20*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci :

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of public ownership, board of directors, audit committee on tax management. This research is a quantitative research on manufacturing sector of goods and consumption sector listed on Indonesia Stock Exchange in 2011 until 2015. Technique of collecting data using purposive sampling with final sample of 95 company. Data analysis techniques used are descriptive statistics, classical assumption test, and hypothesis testing with multiple linear regression using the help of IBM SPSS Statistic version 20 program. Partial research results show that public ownership and audit committee have no effect on tax management, the board of directors have a positive effect on tax management, while simultaneous research results show public ownership, board of directors, and audit committee simultaneously affect tax management.

Keywords : Public ownership, Board of directors, Audit Committee and Tax Management



**The 9th FIPA: Forum
Ilmiah Pendidikan
Akuntansi - Universitas
PGRI Madiun**
Vol. 5 No. 1
Hlmn. 132-145
Madiun, Oktober 2017
e-ISSN: 2337-9723

Artikel masuk:
23 September 2017
Tanggal diterima:
01 Oktober 2017

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi perusahaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, utamanya di pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan nasional dan pendapatan negara dari sektor pajak yang besar. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian, perencanaan yang telah disusun dengan baik dalam upaya kegiatan pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat baik secara materiil maupun spiritual (Nuraina dan Savitri, 2017:45).

Pajak merupakan pemasukan kas negara yang paling besar, sehingga pajak dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi ekonomi, pajak merupakan suatu pemindahan sumber daya yang dimiliki perusahaan ke sektor publik, sedangkan bagi negara pajak adalah sumber penerimaan kas negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam praktik pelaksanaan penerimaan pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan (Suandy, 2011:1). Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak.

Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara, sehingga muncul keinginan perusahaan untuk mengefisiensi beban pajak agar dapat memaksimalkan labanya dengan cara melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak diperlukan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen pajak merupakan proses mengelola dan mengatur beban pajak yang harus dibayar. Mekanisme efisiensi melalui manajemen pajak dapat dilaksanakan jika manajemen dalam pengelolaan dan pelaksanaan di perusahaan dapat diterapkan dengan baik. Untuk menerapkan pengelolaan dalam perusahaan disebut *Corporate governance* (CG).

"*Corporate governance* (CG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diciptakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Astuti, 2015:69)", selain itu *Corporate governance* (CG) juga dapat diartikan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam upaya membangun perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan pengelolaan, pengawasan, demi tujuan perusahaan. Peran *corporate governance* (CG) sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* (CG) diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien, sehingga dengan adanya *corporate governance* (CG) dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Salah satu penerapan *corporate governance* (CG) yaitu untuk menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Oleh karena itu perusahaan melakukan manajemen pajak, dengan tetap memperhatikan tata kelola dan prinsip dalam *corporate governance* (CG) yang ada di perusahaan.

Penerapan *corporate governance* (CG) dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan untuk berperilaku profesional, transparan, dan efisiensi serta dapat mengoptimalkan fungsi kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit. *Corporate governance* (CG) dapat diukur dari beberapa proksi salah satunya kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit. Krisma, dkk (2014) melakukan penelitian terkait pemeriksaan tata kelola perusahaan dan manajemen pajak perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada salah satu proksi *corporate governance* yaitu jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan Ain dan Subardjo (2015) melakukan penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Hasilnya menunjukkan bahwa Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, dari hasil penelitian tersebut perusahaan dapat melakukan pengelolaan dengan baik, sehingga perusahaan dapat menerapkan manajemen pajak dengan cara mengefisiensi beban pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor barang dan konsumsi di Indonesia, dalam *corporate governance* yang diteliti adalah kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit. *Corporate governance* yang baik akan memacu manajemen untuk mengelola, merencanakan, mengatur, dan mengawasi sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dapat memotivasi manajemen untuk mencari strategi manajemen pajak yang efektif dengan tujuan memperkecil pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dari perpajakan, sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan, selain itu dengan adanya penerapan manajemen pajak perusahaan dapat memenets pengeluaran keuangan perusahaan dengan baik.

Menurut Muid dan Santoso (2014:4) "Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan perusahaan". Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi bagi masyarakat dalam memberikan imbalan (*dividen*) yang layak dan dianggap mampu beroperasi secara terus menerus (*going concern*) sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan pengelolaan yang baik. Untuk melakukan pengelolaan yang baik, perusahaan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Efisiensi pajak yaitu usaha untuk mengurangi beban pajak. Untuk dapat melaksanakan efisiensi pajak, perusahaan harus melakukan manajemen pajak, sehingga kepemilikan publik berpengaruh terhadap manajemen pajak. Mengacu pada penelitian Harto dan Puspita (2014) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dan akan mempengaruhi manajemen pajak tersebut. Berdasarkan asumsi diatas diduga kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Menurut Destriana dan Arifin (2016:88) dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang terdiri dari beberapa anggota untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Semakin banyak dewan direksi akan memberikan suatu bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan baik, akan berpengaruh pada pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan yang dapat melakukan pengelolaan dengan baik, berarti perusahaan tersebut berupaya melaksanakan efisiensi pajak. Efisiensi pajak menjadi salah satu alternatif/solusi manajemen menekan beban pajak sehingga pendapatan/keuntungan bertambah. Mengacu pada penelitian Krisma, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan

direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan pada penelitian Ain dan Subardjo (2015) menunjukkan hasil kompensasi direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif yang artinya kompensasi mempengaruhi kinerja dewan direksi, sehingga akan berpengaruh pada dewan direksinya. Berdasarkan asumsi diatas, diduga dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak. Efisiensi beban pajak salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran beban pajak. Untuk dapat melakukan efisiensi pajak, perusahaan dapat menerapkan manajemen pajak, agar perusahaan mendapatkan keuntungan/laba. Mengacu pada penelitian Ain dan Subardjo (2015) menunjukkan hasil bahwa Komite audit berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan pada penelitian Boubaker dan Dridi (2016) menunjukkan hasil bahwa Komite audit berpengaruh terhadap LTD, LTD yaitu penggabungan manajemen laba dan manajemen pajak, sehingga komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan asumsi diatas diduga komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Menurut Fahriani (2016), Muid dan Santoso (2014) kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit memiliki proporsi yang berbeda-beda dan tugas dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan, hal ini dapat dilihat dari tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit untuk melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan porsi dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Mengacu pada penelitian Harto dan Puspita (2014), Krisma, dkk (2014), Ain dan Subardjo (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada perusahaan yang diteliti dan periodenya. Berdasarkan beberapa asumsi tersebut diduga, kepemilikan kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dengan melihat data yang ada di laporan keuangan perusahaan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* atau berkala. Populasi dalam penelitian ini perusahaan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima tahun dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 39 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan merupakan kelompok perusahaan sektor barang dan konsumsi di PT Bursa Efek Indonesia yang tercatat pada periode observasi.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember pada periode observasi.

3. Perusahaan mempunyai kecukupan data mengenai manajemen pajak, yaitu sesuai dengan perhitungan, misalkan hasilnya rentang antara 0 sampai dengan 1.

Tabel 1

Jumlah Sampel Setelah dilakukan Pengambilan Kriteria

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan manufaktur	147
Perusahaan non sektor barang dan konsumsi	(108)
Jumlah perusahaan sektor barang dan konsumsi	39
Data tentang variabel Y yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan yaitu > 1	(20)
Jumlah Akhir Sampel	19
Jumlah Data Observasi (19 x 5)	95

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada dalam penelitian ini yang terdiri dari kepemilikan publik (X_1), dewan direksi (X_2), komite audit (X_3) dan manajemen pajak (Y). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *standar deviasi*, *mean*, *maksimum* dan *minimum*. Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. "Analisis regresi linear digunakan untuk menaksirkan atau meramalkan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan (Priyatno, 2009:40)". Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* yaitu kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit terhadap manajemen pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$Y' = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

- Y' = manajemen pajak
 b_0 = konstanta
 $b_{1,2,3}$ = koefisien regresi
 X_1 = kepemilikan publik
 X_2 = dewan direksi
 X_3 = komite audit

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Hasil perhitungan statistik deskriptif pada penelitian ini dengan menggunakan variabel kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit dan manajemen pajak yang menunjukkan hasil *standar deviasi* lebih kecil dari *mean*, dengan nilai *standar deviasi* dari

kepemilikan publik adalah 13,216683 dan nilai *mean* adalah 21,18771, nilai *standar deviasi* dari dewan direksi adalah 0,80130 dan nilai *mean* adalah 2,3365, nilai *standar deviasi* dari komite audit adalah 0,21720 dan nilai *mean* adalah 0,9710, nilai *standar deviasi* dari manajemen pajak adalah 0,99301 dan nilai *mean* adalah 0,28244.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji normalitas data dilakukan untuk memastikan bahwa semua data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji multikolonieritas pada penelitian ini menggunakan nilai tolerance dan VIF, tujuannya untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi yang sangat kuat antar variabel bebas (*independen*). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam penelitian ini terjadi heteroskedastisitas apa tidak. Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pada penelitian ini terjadi autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan histogram membentuk lonceng sempurna, sedangkan pada grafik P-P *Plot* penyebaran titik-titiknya belum mengikuti garis diagonal, sehingga data menunjukkan tidak terdistribusi normal. Uji *kolmogorov smirnov* dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig.* Sebesar 0,060 atau lebih dari 0,05, berdasarkan hasil uji *kolmogorov smirnov* data terdistribusi normal. Namun dalam uji normalitas data pada penelitian ini grafik P-*Plot* tidak terdistribusi normal, sedangkan pada penelitian data harus terdistribusi normal. Untuk mendistribusikan data menjadi normal dilakukan transformasi data.

Transformasi data pada penelitian ini menggunakan rumus $\sqrt{k-x}$. Setelah dilakukan transformasi data, dilanjutkan dengan pengujian normalitas, dengan hasil uji histogram dapat dikatakan berbentuk lonceng sempurna, sedangkan pada gambar grafik P-P *Plot* penyebaran titik-titiknya mengikuti garis diagonal, sehingga data terdistribusikan normal. Pada uji *kolmogorov smirnov* nilai *Asymp.Sig.(2 tailed)* yaitu 0,213. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan data penelitian telah terdistribusi normal.

Hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas, dimana nilai tolerance dari kepemilikan adalah 0,975 dan VIF 1,026, nilai tolerance dari dewan direksi 0,973 dan VIF 1,028, nilai tolerance dari komite audit adalah 0,998 dan VIF 1,002. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan melihat *scatter plot* dan uji *park*, dengan hasil pada *scatter plot* tidak terjadi heteroskedastisitas, karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk uji *park* dengan melihat nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Hasil uji *park* nilai signifikansi dari kepemilikan publik adalah 0,856, nilai signifikansi dari dewan direksi adalah 0,746, dan nilai signifikansi dari komite audit adalah 0,930, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat hasil Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, yaitu dengan melihat nilai Durbin-Watson berada diantara du dan 4-du, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

Analisis Regresi linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk pengujian hipotesis. Adapun hasil dari pengujian regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	,375	,059	6,395	,000
1	KP	-,001	,001	-,119	,239
	sqrt_DD	-,039	,012	-,311	,003
	sqrt_KA	,016	,045	,036	,718

Beberapa variabel dalam model penelitian ini menggunakan transformasi data SQRT sehingga berdampak pada arah hubungan persamaan regresi, sehingga hasil hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis alternatif (H1) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik secara signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan publik sebesar $0,239 > 0,05$ dan $t_{hitung} = -1,185$, $t_{tabel} = 1,9864$ yang berarti $-1,185 < 1,9864$, sehingga dapat disimpulkan H1 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak.

Hipotesis alternatif (H2) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan direksi secara signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel dewan direksi sebesar $0,003 < 0,05$ dan $t_{hitung} = -3,084$, $t_{tabel} = 1,9864$ yang berarti $-3,084 < 1,9864$, sehingga dapat disimpulkan H2 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap manajemen pajak.

Hipotesis alternatif (H3) bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit secara signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel komite audit sebesar $0,718 > 0,05$ dan $t_{hitung} = 0,362$, $t_{tabel} = 1,9864$ yang berarti $0,362 < 1,9864$, sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak.

Tabel 3
Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	,094	3	,031	3,425	,020 ^b
	Residual	,833	91	,009		
	Total	,927	94			

a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), sqrt_KA, KP, sqrt_DD

Pada Tabel 10 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi F adalah sebesar $0,020 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $3,425 > 2,71$ maka H_0 diterima dan H_3 yang menyatakan kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Menurut Jasman (2015:6) proporsi saham publik dirancang dengan menghitung seberapa besar presentase saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Sholichah (2015:6) memaparkan bahwa proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar tergantung dari seberapa besar presentase saham yang di investasikan ke perusahaan. Berdasarkan pendapat di atas kepemilikan publik memiliki proporsi saham yang berbeda-beda tergantung dari investornya.

Besar kecilnya proporsi kepemilikan publik, tidak akan berpengaruh terhadap pengelolaan perusahaan dan manajemen pajak, karena kepemilikan publik tidak memiliki peran besar dan wewenang dalam mengembangkan perusahaan dan pengambilan keputusan, sehingga kepemilikan publik hanya dapat mengikuti prosedur dan aturan dari perusahaan. Kepemilikan publik dengan proporsi besar maupun kecil tidak akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan dalam hal laba/keuntungan perusahaan, karena kepemilikan publik hanya memiliki sedikit peran di dalam perusahaan, sehingga deviden yang didapat antara pemegang saham publik dengan pemegang saham publik yang lain hampir sama pembagiannya.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Darsono (2015), Muid dan Santoso (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak termasuk dalam manajemen pajak, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. hal ini karena kepemilikan publik tidak bisa menerapkan manajemen pajak, sehingga akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dibuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap manajemen pajak. Setiap perusahaan memiliki anggota dewan direksi yang berbeda-beda jumlahnya, tergantung dari besar kecilnya perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah dewan direksi mengindikasikan pembagian tugas dan wewenang semakin baik sehingga pengelolaan perusahaan semakin baik, salah satu bentuk pengelolaan adalah penerapan efisiensi pajak atau manajemen pajak dengan baik sesuai aturan perpajakan. Perusahaan dengan anggota dewan direksi yang besar dan saling kerjasama mampu mengendalikan pengaturan pajak dengan benar. Keberadaan jumlah anggota dewan direksi sangat berpengaruh dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dan menerapkan efisiensi pajak dalam perusahaan.

Dewan direksi memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perkembangan pengelolaan perusahaan dan penerapan efisiensi pajak atau manajemen pajak agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang, sehingga dapat dikatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Krisma, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan pada penelitian Ain dan Subardjo (2015) menunjukkan hasil kompensasi direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif yang artinya kompensasi mempengaruhi kinerja dewan direksi, sehingga akan

berpengaruh pada dewan direksinya. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, jumlah sampel dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga diindikasikan pengaruhnya positif.

Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Banyaknya anggota komite audit dalam perusahaan belum tentu komite audit tersebut dapat melaksanakan tugas dan wewenang di perusahaan, sehingga tidak menjamin jumlah komite audit dapat melakukan pengelolaan perusahaan dan menerapkan efisiensi pajak atau manajemen pajak dalam perusahaan dengan benar, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kerjasama antar komite audit satu dengan yang lain, sehingga akan berdampak pada kinerja komite audit. Sesuai dengan aturan BAPEPAM yaitu jumlah komite audit dalam perusahaan minimal 3 orang, tetapi tidak semua perusahaan sektor barang dan konsumsi beranggotakan 3 orang, sehingga komite audit yang ada di perusahaan belum dapat memaksimalkan kinerjanya dengan baik, yang akan berdampak pada efisiensi pajak atau manajemen pajak.

Keberadaan jumlah komite audit dalam perusahaan juga belum dapat memaksimalkan fungsinya dalam praktik akuntansi. Keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan akuntansi yang akan dikeluarkan perusahaan, tetapi tidak langsung terlibat atas penyelesaian masalah keuangan yang dihadapi perusahaan, sehingga dapat dikatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Fahriani (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif dan penelitian Susanto dan Damayanti (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tindakan pajak agresif dan *tax avoidance* termasuk dalam manajemen pajak, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kepemilikan Publik, Dewan Direksi, Komite Audit Berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dibuktikan bahwa kepemilikan publik, dewan direksi, komite audit secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap manajemen pajak. Kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit menjadi pemicu perkembangan perusahaan dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan menerapkan efisiensi pajak atau manajemen pajak dengan baik, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan/laba yang diperoleh melalui penerapan efisiensi pajak atau manajemen pajak, yaitu dengan cara membayar beban pajak sekecil mungkin sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Melakukan manajemen pajak adalah salah satu cara untuk mencapai laba/keuntungan perusahaan. Selain itu banyak hal pula yang mempengaruhi manajemen pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen pajak pada perusahaan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan Harto dan Puspita (2014), Krisma, dkk (2014), dan Ain dan Subardjo (2015).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur di bei 2011-2015, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, besar kecilnya proporsi kepemilikan publik, tidak akan berpengaruh terhadap pengelolaan perusahaan dan manajemen pajak, karena kepemilikan publik tidak memiliki peran besar dan wewenang dalam mengembangkan perusahaan dan pengambilan keputusan, sehingga kepemilikan publik hanya dapat mengikuti prosedur dan aturan dari perusahaan.
- b. Dewan direksi secara parsial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Jumlah anggota dewan direksi yang ada di perusahaan sangat berpengaruh dalam melakukan pengelolaan dengan baik dan menerapkan efisiensi pajak atau manajemen pajak.
- c. Komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Jumlah komite audit dalam perusahaan tidak menjamin dapat melakukan efisiensi pajak dengan benar, karena peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan efisiensi pajak perusahaan di Indonesia.
- d. Kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini mempunyai andil dalam menerapkan manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari kinerja ketiga variabel tersebut yang baik dalam pengembangan perusahaan, sehingga ketiga variabel ini sangat berpengaruh dalam pengelolaan perusahaan dan menerapkan efisiensi pajak atau manajemen pajak.

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan di atas, dalam penelitian ini dapat disampaikan saran bagi pihak-pihak sebagai berikut: (1) Bagi Perusahaan Manufaktur: Bagi perusahaan disarankan agar lebih mengoptimalkan fungsi dari dewan direksi dan komite audit lebih sehingga kinerja dari dewan dan komite tidak hanya sebagai pemenuhan ketentuan saja. (2) Bagi Investor dan Calon Investor: Bagi calon investor yang akan berinvestasi disarankan agar lebih teliti dalam menilai perusahaan dari berbagai aspek, diantaranya: kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit. (3) Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah variabel penelitian sehingga dapat memperluas pengetahuan mengenai manajemen pajak seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komisaris independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Q & Subardjo, A. (2015). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (12), 1-15.
- Boubaker, A., & Dridi, W. (2016). Corporate Governance and Book-Tax Differences: Tunisian Evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 8 (1), 171-186.
- Darsono & Prayogo., H., K. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4 (3), 1-12.

- Destriana, M. & Arifin, L.(2016). Pengaruh Firm Size Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18 (1), 84-93.
- Astuti, E. (2015). Studi Literatur: Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 4 (1), 68-72.
- Fahriani, M. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (7), 1-20.
- Harto, P., & Puspita, R., S. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3 (2), 1-13.
- Jasman (2015). Manajemen Laba Bukti Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11 (1), 1-14.
- Krisma, Dwi. A. B. E., Anwar, Y., & Mulyadi, S. M. (2014). Examining Corporate Governance and Corporate Tax Management. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 3 (3), 47-52.
- Muid, D & Santoso, B. T. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengindaran Pajak Peusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3 (4), 1-11.
- Nuraina, E., & Savitri, F. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Equilibrium*, 5 (1), 45-55.
- Priyatno, D. (2009). *SPSS analisis Korelasi Regresi dan Multivariate*. Yogyakarta:Gava Media.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.
- Susanto, T., & Damayanti, F. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5 (2), 187-206.
- Sholichah, A. W. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (10), 1-17.

LAMPIRAN

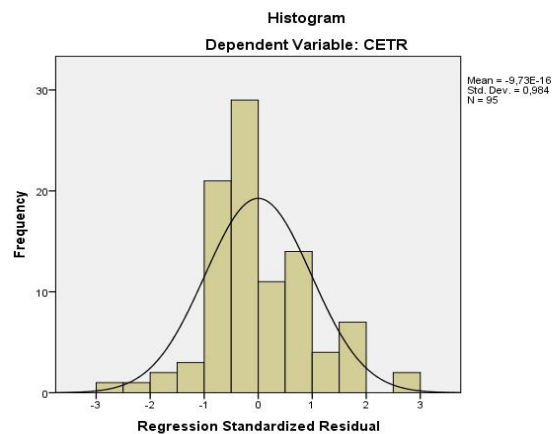
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	95	1,040	49,910	21,18771	13,216683
sqrt_DD	95	,00	3,00	2,3365	,80130
sqrt_KA	95	,00	1,41	,9710	,21720
CETR	95	,004	,576	,28244	,099301
Valid N (listwise)	95				

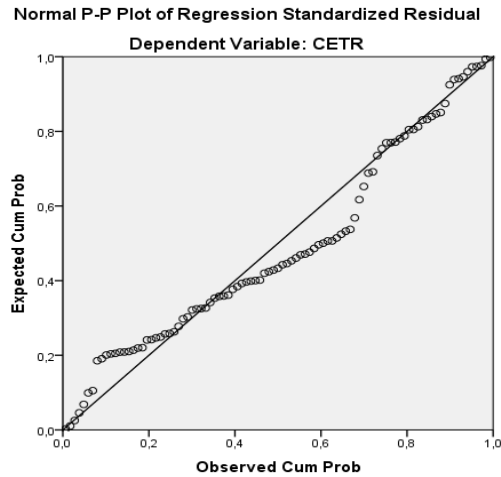
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Sebelum transformasi Grafik Histogram



Sebelum transformasi Normal *Probability Plot*

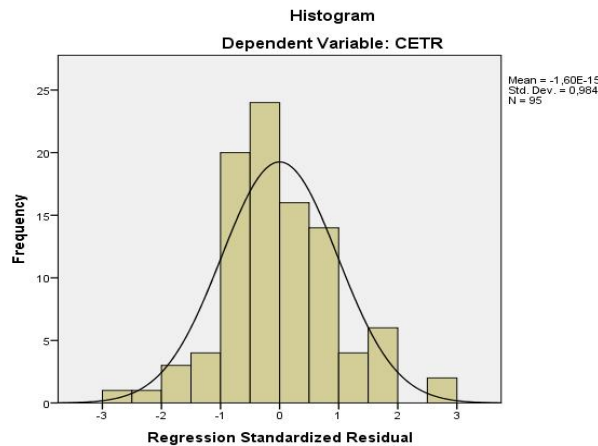


Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Transformasi

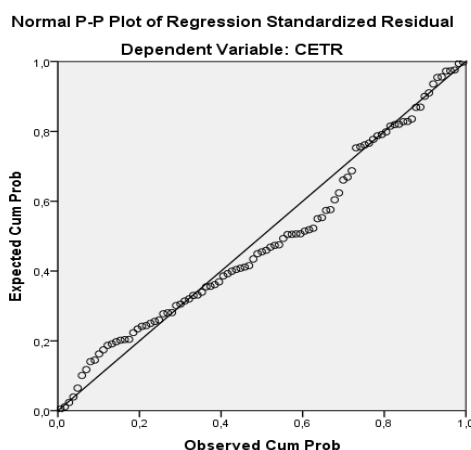
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,0948483
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,136
	Negative	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		1,324
Asymp. Sig. (2-tailed)		,060
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Grafik Histogram Sesudah transformasi



Normal Probability Plot Sesudah Transformasi



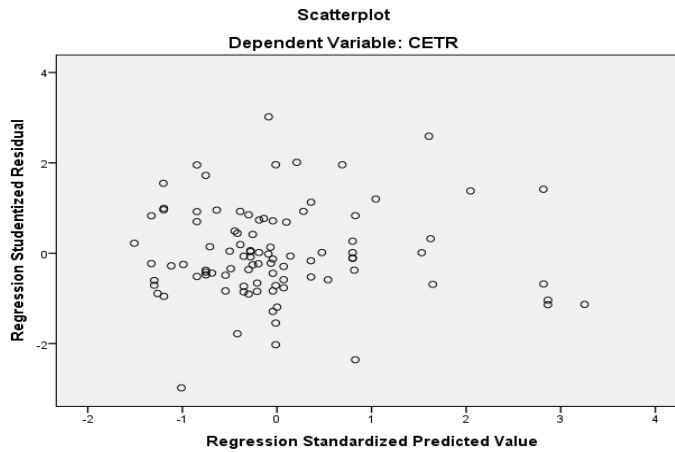
Uji Kolmogorov Smirnov sesudah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,0941287
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		1,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,213
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
KP	,975	1,026	Tidak terjadi multikolonieritas
sqrt_DD	,973	1,028	Tidak terjadi multikolonieritas
sqrt_KA	,998	1,002	Tidak terjadi multikolonieritas

Uji Heteroskedastisitas



Uji Park

Keterangan			
Model	T	Sig.	
1 (Constant)	-3,863	,000	
KP	,182	,856	Tidak terjadi heteroskedasitistas
sqrt_DD	-,325	,746	Tidak terjadi heteroskedasitistas
sqrt_KA	-,088	,930	Tidak terjadi heteroskedasitistas

Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Kriteria			Keterangan
	dU	DW	4-dU	
1,861	1.732	1.861	2.268	Tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif

Skala Durbin-Watson

